

ABSTRAK

Ade Fitri (1202554/2012). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Resistensi Terhadap Perubahan dan Sistem Informasi terhadap Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual (*Studi Empiris pada SKPD Pemerintahan Kota Pariaman*)

**Pembimbing : 1. Nurzi Sebrina, SE, M.Sc, Ak
2. Halmawati, SE, M.Si**

Penelitian ini bertujuan untuk melihat pengaruh kompetensi sumber daya manusia, resistensi terhadap perubahan, dan sistem informasi terhadap implementasi standar akuntansi pemerintah berbasis akrual. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh SKPD yang ada pada Pemerintahan Kota Pariaman yaitu sebanyak 28 SKPD. Sampel dalam penelitian ini menggunakan teknik pengambilan sampel *total sampling*. Analisis dilakukan dengan menggunakan model regresi berganda. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa kualitas sumber daya manusia, sistem informasi berpengaruh signifikan positif terhadap implementasi standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual (sig 0,000 dan 0,004). dan resistensi terhadap perubahan berpengaruh signifikan negatif terhadap implementasi standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual .

Kata Kunci : Kompetensi Sumber Daya Manusia, resistensi terhadap perubahan dan Sistem Informasi.

Abstract

The aimed of this study to examined the quality of human resources, resistance to change and the information systems to the implementation of accrual based government accounting standard. The population in this study was all SKPD in Pariaman city as many as 28 SKPD. The sample in this study used a sampling technique total sampling. Analyses were performed using multiple regression models. These results indicated that the quality of human resources and information systems are positive significant effect on the implementation of accrual-based accounting standard (sig 0.000 and 0,004). Resistance to change negative significant effect on the implementation of accrual based government accounting standar.

Keyword : competence of human resources, resistance to change and information systems.

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Salah satu kunci penting dalam pengelolaan keuangan negara adalah dengan melakukan pengembangan kebijakan standar akuntansi pemerintahan yang bertujuan untuk memberikan pedoman pokok dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan pemerintah baik pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.

Pemerintah telah menetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang standar akuntansi pemerintah. Standar Akuntansi Pemerintahan tersebut menganut basis kas menuju akrual (*cash toward accrual*) yaitu menggunakan basis kas untuk pengakuan transaksi pendapatan, belanja dan pembiayaan. Namun penerapan peraturan ini masih bersifat sementara sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara yang menyatakan bahwa selama pengakuan dan pengukuran pendapatan dan belanja berbasis akrual belum dilaksanakan, digunakan pengakuan dan pengukuran berbasis kas.

Oleh karena itu, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 perlu diganti. Sejak 22 Oktober 2010, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang standar akuntansi pemerintahan (SAP) berbasis akrual yang akan dimulai pada tahun 2015. Dikeluarkannya PP Nomor 71 Tahun 2010 pemerintah daerah mempunyai keharusan untuk menjalankan pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual. Hal tersebut menyebabkan pemerintah daerah banyak menemukan kesulitan dalam memahami standar akuntansi pemerintah berbasis akrual dan implementasinya dalam menyusun laporan keuangan pemerintah daerah.

Menurut Mahmud (2016) akuntansi dengan basis akrual ini dianggap lebih baik

daripada basis kas, karena akuntansi berbasis akrual diyakini dapat memberikan gambaran yang sebenarnya mengenai posisi keuangan dan paling relevan sesuai dengan kebutuhan sekarang.

Namun dalam praktek pembuatan laporan akuntansi berbasis akrual di daerah, masih mengalami banyak kendala. Menurut yang disampaikan oleh wali kota Pariaman pada sambutannya di acara bimbingan teknis (Bimtek) kendala-kendala tersebut berada lemahnya kemauan untuk belajar dimana sebagian cenderung bekerja rutin dengan kemampuan dan keterampilan yang tidak pernah ditingkatkan, kendala-kendala ini mempengaruhi opini wajar tanpa pengecualian (WTP) (www.portalberitaeditor.com).

Senada dengan hal itu anggota VI BPK Baharullah Akbar dalam sosialisasi implementasi standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual pada penyusunan LKPD dan implikasinya terhadap opini BPK, bahwa pemerintah daerah dalam laporan keuangan pemerintah daerah belum mampu memberikan kepuasan atau memberikan keyakinan terhadap masyarakat dan juga mengalami kesulitan dalam transisi dari laporan berbasis kas ke laporan berbasis akrual. Hal ini sesuai dengan penelitian Ni Made (2015) yang menyatakan bahwa masalah klasik yang dihadapi dalam pengelolaan keuangan negara adalah sumber daya manusia yang kurang memadai.

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) berbasis akrual, berdasarkan penelitian sebelumnya menjelaskan beberapa faktor yang mempengaruhi implementasi SAP berbasis akrual yaitu kompetensi sumber daya manusia, komunikasi, komitmen organisasi, dan gaya kepemimpinan (I Wayan, 2015), komitmen, sumber daya manusia, sarana dan prasarana, dan sistem informasi (Ririz, 2013), komunikasi, Kompetensi Sumber daya Manusia,

Struktur Birokrasi, Komitmen Pimpinan, dan Resistensi terhadap Perubahan (Herlina, 2013), Komunikasi, Kompetensi Sumber Daya Manusia, Resistensi Terhadap Perubahan, Komitmen Pemimpin (Arif, 2015). Pada penelitian ini faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual akan difokuskan berdasarkan kompetensi sumber daya manusia, resistensi terhadap perubahan dan sistem informasi.

Kelebihan dari SAP berbasis akrual di Pemerintahan Kota Pariaman belum sepenuhnya dirasakan, sebab masih banyak laporan keuangan SKPD yang laporan keuangannya untuk saat ini masih terbilang lemah, pernyataan ini disampaikan oleh wakil wali kota pariaman pada sambutannya di acara bimbingan teknis (Bimtek) pada bulan Desember tahun 2015 lalu. Hal ini disebabkan karena ketidaktahuan dan lemahnya kemauan untuk belajar. Dimana sebagian cenderung bekerja rutin dengan kemampuan dan keterampilan yang tidak pernah ditingkatkan, permasalahan ini nantinya menjadi temuan yang mempengaruhi upaya mempertahankan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) pada Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) dari Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) (www.portalberitaeditor.com).

Selain itu masih banyak kendala yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah, seperti yang diungkapkan oleh anggota VI Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) Baharullah Akbar dalam sosialisasi Implementasi Akuntansi Berbasis Akrual pada Penyusunan LKPD dan Implikasinya Terhadap Opini BPK, bahwa pemerintah daerah dalam laporan keuangan daerah belum mampu memberikan kepuasan atau memberikan keyakinan terhadap masyarakat dan juga masih mengalami kesulitan dalam transisi dari laporan berbasis kas ke laporan berbasis akrual. Ini disebabkan oleh kualitas sumber daya manusia yang masih rendah dan belum semua daerah memiliki

sarana penunjang pengauditan, seperti audit elektronis (www.bpkri.go.id). Oleh karena itu penerapan SAP berbasis akrual harus dilakukan secara hati-hati dengan persiapan yang matang dan terstruktur terkait dengan peraturan dan sistem yang telah ditentukan.

Dari perbedaan hasil penelitian terdahulu dan fenomena yang terjadi maka peneliti ingin meneliti ulang mengenai implementasi standar akuntansi pemerintah berbasis akrual. Hal ini dikarenakan dalam setiap implementasi suatu kebijakan akan ada permasalahan atau tantangan yang akan dihadapi serta faktor-faktor tertentu yang dapat mempengaruhi pengimplementasian standar akuntansi pemerintah berbasis akrual.

Berdasarkan uraian di atas maka penulis tertarik untuk meneliti dengan judul "**Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Resistensi terhadap Perubahan, dan Sistem Informasi, Terhadap Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual (Studi Empiris Pada Pemerintahan Kota Pariaman)**".

B. Rumusan Masalah

1. Se jauh mana pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap implementasi sistem akuntansi pemerintah berbasis akrual di Pemerintah Kota Pariaman?
2. Se jauh mana pengaruh resistensi terhadap perubahan terhadap implementasi sistem akuntansi berbasis akrual di Pemerintah Kota Pariaman?
3. Se jauh mana pengaruh sistem informasi terhadap implementasi sistem akuntansi pemerintah berbasis akrual di Pemerintah Kota Pariaman?

KAJIAN TEORI

1. Implementasi Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual (PP 71 Tahun 2010)

Definisi SAP Dalam PP No 24 Tahun 2005 standar akuntansi pemerintahan (SAP) merupakan serangkaian prosedur

manual maupun yang terkomputerisasi mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran dan pelaporan posisi keuangan dan operasi keuangan pemerintah.

Sedangkan berdasarkan PP 71 Tahun 2010, standar akuntansi pemerintahan (SAP) adalah prinsip-prinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan pemerintah.

Akuntansi Berbasis akrual adalah suatu basis akuntansi dimana transaksi ekonomi dan peristiwa lainnya diakui, dicatat dan disajikan dalam laporan keuangan pada saat terjadinya transaksi tersebut, tanpa memperhatikan waktu kas atau setara kas diterima atau dibayarkan.

Dalam akuntansi berbasis akrual, waktu pencatatan (*recording*) sesuai dengan saat terjadinya arus sumber daya, sehingga dapat menyediakan informasi yang paling komprehensif karena seluruh arus sumber daya dicatat. Dengan pelaporan berbasis akrual, pengguna dapat mengidentifikasi posisi keuangan pemerintah dan perubahannya, bagaimana pemerintah mendanai kegiatannya sesuai dengan kemampuan pendanaannya sehingga dapat diukur kapasitas pemerintah yang sebenarnya. Standar akuntansi pemerintah berbasis akrual juga memungkinkan pemerintah untuk mengidentifikasi kesempatan dalam menggunakan sumber daya masa depan dan mewujudkan pengelolaan yang baik atas sumber daya tersebut.

Indikator yang implementasi SAP berbasis akrual menurut biro analisis dan Pelaksanaan APBN (2014) adalah:

- 1) Persiapan SDM yang kompeten
- 2) Pelatihan dan sosialisasi PP 71 Tahun 2010 secara intensif
- 3) Struktur organisasi mengakomodasi proses penyusunan LPK berbasis akrual
- 4) Pemerintah daerah menyusun kebijakan dan sistem akuntansi sesuai dengan PP 71 Tahun 2010.
- 5) Integrasi aplikasi pengelolaan keuangan daerah

- 6) Alokasi anggaran untuk kegiatan pelaksanaan akuntansi berbasis akrual
- 7) Pengembangan aplikasi/sistem pengelolaan keuangan sesuai dengan pengelolaan berbasis akrual

2. Kompetensi Sumber Daya Manusia

Kompetensi sumber daya manusia adalah kemampuan seseorang atau individu, suatu organisasi (kelembagaan), atau suatu sistem untuk melaksanakan fungsi-fungsi atau kewenangannya untuk mencapai tujuannya secara efektif dan efisien. Kapasitas harus dilihat sebagai kemampuan untuk mencapai kinerja, untuk menghasilkan keluaran-keluaran (*outputs*) dan hasil-hasil (*outcomes*). Semakin tinggi kompetensi sumber daya manusia maka kualitas laporan keuangan pemerintah daerah juga akan semakin tinggi (Novalia, 2015).

Indikator kompetensi SDM yang dikemukakan oleh (Bagus & I Dewa 2016) adalah:

- 1) Sumber daya manusia yang andal
- 2) Kompetensi sumber daya manusia
- 3) Kemampuan memahami
- 4) Komunikasi yang baik
- 5) Memiliki pengetahuan, kemampuan dan keterampilan
- 6) Perekrutan dan pelatihan.

3. Resistensi Terhadap Perubahan

Resistensi terhadap perubahan sebagai kecenderungan bagi pekerja untuk tidak ingin berjalan seiring dengan perubahan organisasi, baik oleh ketakutan individual atas sesuatu yang tidak diketahui atau kesulitan organisasional (Herlina, 2013).

Beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya resistensi terhadap perubahan menurut Wahab (2015)

- 1) Kekhawatiran terhadap perubahan yang tidak pasti
- 2) Perubahan akan berdampak pada faktor ekonomi
- 3) Perubahan dapat mengancam keamanan yang sudah dirasakan
- 4) Perubahan dapat merubah status yang telah ada "*status fear*"

Menurut Wibowo (2006) menyebutkan bahwa ada dua faktor yang terjadi terhadap resistensi terhadap perubahan yaitu faktor individual dan organisasional.

- 1) Resistensi individual
 - a. *Habits* (kebiasaan)
 - b. *Security* (keamanan)
 - c. *Economic factor* (faktor ekonomi)
 - d. *Fear of the unknown* (ketakutan atas ketidaktahuan)
 - e. *Selective information processing* (proses informasi selektif)
- 2) Resistensi organisasional
 - a. *Structural Inertia* (kelembaman struktur)
 - b. *Limited focus of change* (fokus terbatas pada perubahan)
 - c. *Group Inertia* (kelembaman kelompok)
 - d. *Threat to Expertise* (ancaman terhadap keahlian)
 - e. *Threat to established power relationships* (ancaman terhadap hubungan kekuasaan yang sudah ada)
 - f. *Threat to established resources* (ancaman terhadap alokasi sumber daya yang sudah ada).

4. Sistem Informasi

Suatu sistem informasi adalah suatu kegiatan dari prosedur-prosedur yang akan diorganisasikan, bilamana dieksekusi akan menyediakan informasi yang mendukung pengambilan keputusan dan pengendalian didalam organisasi (Jogiyanto, 2000).

Komponen pokok sebuah sistem informasi menurut marwansyah (2012) ialah:

- 1) Tepat waktu, seorang manajer harus memiliki akses terhadap informasi yang paling mutakhir.
- 2) Akurat, seorang manajer harus dapat menyerap sekaligus sejumlah besar informasi yang disediakan.
- 3) Ringkas, seorang manajer dapat menyerap sekaligus sejumlah besar informasi pada suatu saat.
- 4) Relevan, seorang manajer hendaknya hanya menerima informasi yang dibutuhkan saja dalam sebuah situasi tertentu.

- 5) Lengkap, seorang manajer hendaknya menerima informasi yang utuh atau lengkap bukan informasi sebagian atau parsial.

5. Penelitian Terdahulu

Penelitian mengenai topik ini pernah dilakukan oleh Hasil penelitian I Wayan (2015) tentang Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual, menunjukkan bahwa kompetensi sumber daya manusia, komunikasi, komitmen organisasi, dan gaya kepemimpinan memiliki pengaruh positif terhadap penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual.

Di samping itu Ririz (2013) juga melakukan penelitian tentang analisis kesiapan pemerintah dalam menerapkan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual, hasil penelitian menunjukkan bahwa komitmen, sumber daya manusia, sarana dan prasarana, dan sistem informasi jika dilihat dari parameter integritas berada pada kategori siap dan untuk kesiapan SDM, kesiapan sistem informasi dan sarana prasarana adalah kategori cukup siap.

Selanjutnya penelitian yang dilakukan oleh Herlina (2013) dengan judul Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kesiapan Pemerintah Daerah dalam Implementasi PP 71 Tahun 2010, diperoleh gambaran bahwa komunikasi, kompetensi sumber daya manusia, struktur birokrasi, komitmen pimpinan dan resistensi terhadap perubahan mempengaruhi kesiapan pemerintah daerah dalam implementasi PP 71 Tahun 2010.

Ika dan Amir (2015) juga melakukan penelitian dengan judul Pengaruh Kompetensi Aparat terhadap Implementasi Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kompetensi aparat tidak berpengaruh terhadap implementasi penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual.

Selanjutnya Ikrima dan Ni Putu (2015) melakukan penelitian tentang pengaruh kualitas sumber daya manusia terhadap Kesiapan Penerapan SAP Berbasis Akrual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kualitas sumber daya manusia berpengaruh terhadap kesiapan penerapan SAP berbasis akrual.

6. Pengaruh Antar Variabel

a. Pengaruh kompetensi sumber daya manusia terhadap implementasi standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual

Sumber daya manusia merupakan faktor penting yang harus dimiliki dalam sebuah organisasi dalam menjalankan kegiatan operasionalnya, sehingga visi, misi, serta tujuan organisasi dapat tercapai sesuai dengan apa yang telah ditetapkan sebelumnya. Menurut Surepno (2015) dari empat hal yang menjadi kunci keberhasilan implementasi salah satunya adalah kompetensi sumberdaya manusia. Senada dengan itu Susilo (dalam Rahmayati, 2012), menyatakan bahwa sumber daya manusia merupakan pilar penyangga utama sekaligus penggerak roda organisasi dalam mewujudkan visi dan misi serta tujuan dari organisasi.

b. Pengaruh resistensi terhadap perubahan dengan implementasi standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual

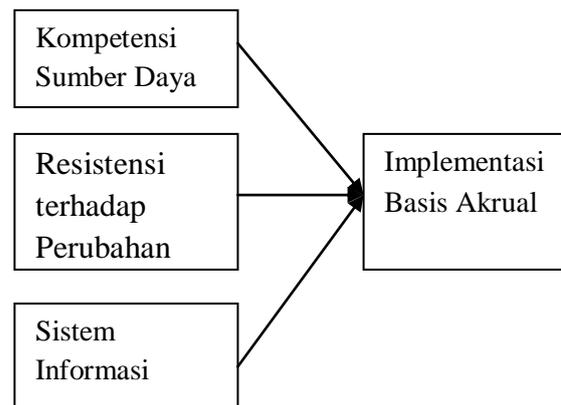
Menurut Herlina (2013) Resistensi terhadap perubahan merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi implementasi standar akuntansi berbasis akrual. Sikap penolakan untuk suatu kebijakan dapat menghambat penerapan kebijakan yang baru. Untuk itu, diperlukan penyusunan berbagai kebijakan dan dilakukan berbagai sosialisasi sehingga penerapan akuntansi pemerintah berbasis akrual dapat berjalan dengan baik.

c. Pengaruh sistem informasi terhadap implementasi standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual

Menurut Ririz (2013) sistem informasi merupakan salah satu faktor yang

mempengaruhi penerapan standar akuntansi pemerintah berbasis akrual Sistem informasi dapat diartikan sebagai suatu pengorganisasian peralatan untuk mengumpulkan, menginput, memproses, menyimpan, mengatur, mengontrol dan melaporkan informasi untuk pencapaian tujuan perusahaan yaitu mensukseskan penerapan basis akrual.

Kerangka Konseptual



Hipotesis

H1 : Kompetensi SDM berpengaruh signifikan positif terhadap implementasi SAP berbasis akrual.

H2: resistensi terhadap perubahan berpengaruh signifikan negatif terhadap implementasi SAP berbasis akrual.

H3 : Sistem informasi berpengaruh signifikan positif terhadap implementasi SAP berbasis akrual.

METODE PENELITIAN

Berdasarkan latar belakang masalah, rumusan masalah dan tujuan penelitian yang telah dikemukakan sebelumnya, maka penelitian ini tergolong penelitian yang menggunakan metode kuantitatif dengan pendekatan kausatif (*causative*). Penelitian kausatif berguna untuk menganalisis pengaruh antara satu variabel dengan variabel lainnya. Dimana penelitian ini bertujuan untuk menganalisis seberapa besar pengaruh suatu variabel terhadap variabel lainnya (Sekaran, 2006). Penelitian ini berusaha menjelaskan pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia (X_1), Resistensi Terhadap

Perubahan (X_2), dan Sistem Informasi (X_3) sebagai variabel independen terhadap Implementasi Sistem Akuntansi Pemerintahan berbasis akrual (Y) sebagai variabel dependen.

Populasi menurut Sugiyono (2008) adalah kumpulan dari seluruh elemen yang sejenis yang dapat dibedakan satu sama lainnya, disebabkan adanya nilai karakteristik yang berlainan. Populasi dalam penelitian ini adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang ada di Pemerintah Kota Pariaman. Berdasarkan data yang diperoleh langsung dari kantor balai kota Pemerintah, jumlah Satuan Kerja Perangkat Daerah pada Kota Pariaman berjumlah 28 SKPD yang terdiri dari Sekda, Badan, Dinas, Kantor, dan Kecamatan.

HASIL PENELITIAN

A. Penujian Instrumen Penelitian

Sebelum instrumen digunakan sebagai alat pengumpul data, maka harus ada pengujian terlebih dahulu agar peneliti mendapat instrumen yang valid (sahih) dan reliabel (terpercaya). Sampel untuk pengujian instrumen penelitian ini diambil dari 32 mahasiswa akuntansi Universitas Negeri Padang yang telah mengambil mata kuliah akuntansi sektor publik yaitu mahasiswa dari semester 6 (enam) sampai selanjutnya. Hal ini dimaksudkan agar uji coba instrumen dapat dilakukan pada populasi peneliti di luar sampel penelitian.

Untuk mempermudah peneliti menganalisis data uji coba instrumen peneliti menggunakan bantuan *Microsoft Word*, *SPSS 16*. Agar mendapat hasil analisis akurat

Uji Validitas dan Reliabilitas Instrumen

Setelah uji instrumen dilakukan, hal selanjutnya yang dilakukan peneliti adalah melakukan tabulasi terhadap hasil jawaban responden yaitu dengan cara menyusun kode jawaban dan mengkode data sesuai klasifikasi jawaban dalam bentuk tabel.

Tabulasi jawaban responden dilakukan dengan bantuan program *microsoft excel*. Pada uji validitas peneliti melakukan perhitungan otomatis. Perhitungan otomatis menggunakan data analysis pada program *Microsoft excel*.

Butir pernyataan yang dinyatakan valid apabila nilai r hitung $>$ r tabel dengan taraf signifikan $\alpha = 0,05$. Dari hasil uji validitas dapat dilihat korelasi antara tiap butir soal dengan skor total dari $n=32$ diperoleh r tabel sebesar 0,3494. Ini berarti bahwa jika nilai korelasi lebih dari 0,3494 maka butir soal dianggap valid, sedangkan jika kurang dari 0,3494 maka soal dianggap tidak valid. Butir Pertanyaan yang akan digunakan pada saat uji hipotesis adalah butir pernyataan yang valid saja, sedangkan item yang tidak valid tidak dapat digunakan dalam penelitian.

Setelah instrumen penelitian telah diuji validitasnya, maka dilanjutkan dengan uji reliabilitas instrumen untuk mengetahui tingkat kepercayaan instrumen penelitian yang digunakan sebagai alat pengumpulan data. Uji reliabilitas terhadap instrumen penelitian yang dihitung menggunakan rumus *cronbach alpha*. Suatu instrumen penelitian dikatakan reliabel apabila nilai reliabilitas instrumen itu sendiri memiliki nilai reliabilitas $>$ 0,60 tetapi jika nilai reliabilitas instrumen $<$ 0,60 maka instrumen tidak reliabel dan tak dapat digunakan dalam penelitian. Perhitungan reliabilitas ini dilakukan dengan cara perhitungan otomatis dengan menggunakan program *SPSS 16*.

Hasil pengolahan data uji coba instrumen penelitian terdapa beberapa butir pernyataan yang tidak valid sehingga dapat disimpulkan bahwa butir pernyataan tersebut gugur dan tidak dapat di gunakan dalam penelitian kepada responden sesungguhnya. Sedangkan untuk reliabilitas uji coba intrumen penelitian hasilnya ialah semua instrumen memiliki *cronbach alpha* $>$ 0,60 sehingga dapat disimpulkan seluruh instrumen penelitian adalah reliabel.

B. Uji Hipotesis (*t test*)

Uji *t* statistik (*t-Test*) bertujuan untuk mengetahui hubungan yang signifikan dari masing-masing variabel bebas terhadap variabel terikatnya. Pengujian hipotesis secara parsial dilakukan dengan cara membandingkan nilai t_{hitung} dengan nilai t_{tabel} . Nilai t_{tabel} dengan $\alpha = 0,05$ dan derajat bebas (db) = $n-k = 83-2 = 81$ adalah 1,664.

1. Pengujian Hipotesis 1

Pengujian hipotesis pertama dilakukan dengan membandingkan nilai t hitung dan t_{tabel} . Hipotesis diterima jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ atau nilai $sig < \alpha$ (0,05). Nilai t_{tabel} pada α (0,05) adalah 1,664. Pada variabel kompetensi SDM (X_1) nilai t_{hitung} adalah 7,149 dan nilai sig adalah 0,000. Hal ini dapat dilihat bahwa $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu $7,149 > 1,664$ atau nilai signifikansi $0,000 < 0,05$. Nilai koefisien β dari variabel X_1 bernilai positif yaitu 0,110. Hal ini

Coefficients^{a,b}

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	14.118	.857		16.471	.000
X1	.110	.015	.589	7.149	.000
X2	-.122	.025	-.244	-4.856	.000
X3	.078	.026	.179	2.972	.004

a. Dependent Variable: Y

b. Weighted Least Squares Regression - Weighted by bobot

menunjukkan bahwa penelitian ini dapat membuktikan kompetensi SDM (X_1) berpengaruh signifikan positif terhadap implementasi SAP berbasis akrual. Jadi hipotesis yang telah dirumuskan sesuai dengan hasil penelitian sehingga H_1 diterima.

Sumber daya manusia merupakan pilar penyangga utama sekaligus penggerak roda organisasi dalam usaha mewujudkan visi dan misi serta tujuan dari organisasi. Kegagalan sumber daya manusia pada pemerintah daerah dalam memahami dan menerapkan logika akuntansi akan berdampak pada kekeliruan laporan keuangan yang dibuat dan ketidaksesuaian laporan dengan standar yang ditetapkan pemerintah. Kompetensi SDM yang belum mampu menguasai logika akuntansi memang menjadi kendala bagi yang akan menerapkan suatu basis akrual adalah

SDM itu sendiri. Persoalan ini sangat mendasar mengingat mekanisme perekrutan PNS yang masih terpusat, meskipun kewenangan untuk pelaksanaan program peningkatan kualitas SDM ada di daerah (Ni Made, 2015).

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa kompetensi sumber daya manusia berpengaruh signifikan positif yang berarti hipotesis pertama diterima. Hal ini menunjukkan bahwa semakin baik sumber daya manusia yang dimiliki dalam suatu pemerintah daerah, maka semakin baik jalannya implementasi standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual.

Sejalan dengan hasil penelitian yang diperoleh, nilai rata - rata kompetensi sumber daya manusia dikategorikan baik dengan nilai 82,91%. Jika dilihat dari tabel distribusi frekuensi, nilai total capaian responden (TCR) yang rendah terdapat pada nomor 8 staf akuntansi telah diberikan pelatihan yang cukup terkait akuntansi 78,55%, Hal ini menunjukkan bahwa pada pernyataan no 8 pemberian pelatihan kepada staf akuntansi merupakan yang paling rendah tingkat capaiannya.

Pada pernyataan no. 8 yaitu staf akuntansi telah diberikan pelatihan yang cukup terkait akuntansi, merupakan tingkat capaian responden paling rendah maka dapat disimpulkan bahwa telah diberikannya pelatihan yang cukup kepada staf akuntansi di setiap SKPD sehingga implementasi SAP berbasis akrual dapat terlaksana dengan baik.

2. Pengujian Hipotesis 2

Pada variabel resistensi terhadap perubahan (X_2) nilai t_{hitung} adalah -4.856 dan nilai sig adalah 0,000. Hal ini dapat dilihat bahwa $t_{hitung} < t_{tabel}$ yaitu $-4.856 < 1,664$ atau nilai signifikansi $0,000 < 0,05$. Nilai koefisien β dari variabel X_2 bernilai negatif yaitu -0,122. Hal ini menunjukkan bahwa penelitian ini membuktikan resistensi terhadap perubahan (X_2) berpengaruh signifikan negatif terhadap implementasi SAP berbasis akrual. Jadi hipotesis yang telah dirumuskan sesuai

dengan hasil penelitian sehingga **H₂ diterima**.

Resistensi terhadap perubahan merupakan sikap enggan kepada penerimaan perubahan. Resistensi ini merupakan suatu perlawanan ataupun penolakan kepada perubahan-perubahan yang terjadi dan yang tidak sesuai. Menurut Barnard dan Jonathan Febrianto (2014) resistensi ini sebenarnya merupakan tindakan yang dilakukan oleh perubahan yang terjadi pada lingkungan yang kurang disosialisasikan serta menimbulkan berbagai permasalahan pada kelompok atau individu yang berusaha untuk beradaptasi dengan lingkungan tersebut. Hal ini terjadi karena pola tingkah laku setiap harinya sudah terbentuk dengan lingkungan yang ada, sehingga hal tersebut sudah menjadi kebiasaan. Akibatnya, orang-orang akan merasa berat beradaptasi terhadap perubahan yang akan terjadi.

Individu atau kelompok juga selalu mempertimbangkan dampak dari perubahan yang mereka dapatkan. Jika berpengaruh positif, mereka akan menerimanya. Sebaliknya, jika tidak sesuai dengan yang mereka harapkan akan memicu munculnya penentangan. Sehingga sikap resistensi dapat mempengaruhi keberhasilan penerapan suatu kebijakan.

Berdasarkan Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa resistensi terhadap perubahan memiliki pengaruh signifikan negatif terhadap implementasi standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual. Hal ini menunjukkan bahwa hasil penelitian tersebut sesuai dengan hipotesis kedua yang menyatakan bahwa resistensi terhadap perubahan memiliki pengaruh signifikan negatif terhadap implementasi standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual, dapat diartikan bahwa terdapatnya suatu penolakan yang terjadi pada SKPD yang ada di kota Pariaman sehingga akan menghambat jalannya implementasi standar akuntansi pemerintah berbasis akrual.

Nilai rata-rata resistensi terhadap perubahan di kategorikan cukup *resisten* dengan nilai 66,80%. Jika dilihat dari tabel distribusi frekuensi, nilai total capaian responden (TCR) yang tertinggi terdapat pada nomor 5 yaitu Tindakan pekerja sesuai dengan kekuatan organisasional tingkat capaian responden 76,39, sehingga dapat disimpulkan bahwa SKPD kota Pariaman mengalami tindakan penolakan terhadap implementasi SAP yaitu tindakan yang dilakukan pekerja sesuai dengan kekuatan organisasional, hal ini berarti staf hanya melakukan kegiatannya sesuai dengan apa yang diperintahkan oleh organisasi.

3. Pengujian Hipotesis 3

Pada variabel sistem informasi (X_3) nilai t_{hitung} adalah 2,972 dan nilai sig adalah 0,004. Hal ini dapat dilihat bahwa $t_{hitung} > t_{tabel}$ yaitu $2,972 > 1,664$ atau nilai signifikansi $0,004 < 0,05$. Nilai koefisien β dari variabel X_3 bernilai positif yaitu 0,078. Hal ini menunjukkan bahwa penelitian ini membuktikan sistem informasi (X_3) berpengaruh terhadap implementasi SAP berbasis akrual. Jadi hipotesis yang telah dirumuskan sesuai dengan hasil penelitian sehingga **H₃ diterima**.

Sistem informasi merupakan kesediaan perangkat lunak (*software*) untuk mengaplikasikan proses bisnis di pemerintahan. Berdasarkan Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem informasi memiliki pengaruh signifikan positif terhadap implementasi standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual. Hal ini menunjukkan bahwa hasil penelitian tersebut sesuai dengan hipotesis ketiga yang menyatakan bahwa sistem informasi memiliki pengaruh signifikan positif terhadap implementasi standar akuntansi pemerintahan berbasis akrual.

Nilai rata-rata sistem informasi di kategorikan baik dengan nilai 85,09%. Jika dilihat dari tabel distribusi frekuensi, nilai total capaian responden (TCR) yang rendah terdapat pada nomor 6 yaitu informasi yang dihasilkan sesuai dengan peraturan perundang-undang yang telah

ditetapkan dengan tingkat capaian responden 84,10%, sehingga dapat disimpulkan bahwa informasi yang dihasilkan oleh SKPD kota Pariaman yang diberikan kepada staf akuntansi/keuangan oleh sistem telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan, sehingga informasi yang dihasilkan dapat diandalkan dan sesuai dengan apa yang diinginkan.

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pengujian hipotesis yang telah dilaksanakan, maka hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Kompetensi sumber daya manusia berpengaruh signifikan positif terhadap implementasi standar akuntansi pemerintah berbasis akrual.
2. Resistensi terhadap perubahan berpengaruh signifikan negatif terhadap implementasi standar akuntansi pemerintah berbasis akrual.
3. Sistem informasi berpengaruh signifikan positif terhadap implementasi standar akuntansi pemerintah berbasis akrual.

B. Keterbatasan Penelitian

Meskipun peneliti telah berusaha merancang dan mengembangkan penelitian sedemikian rupa, namun masih terdapat beberapa keterbatasan dalam penelitian ini, diantaranya :

1. Hanya ada tiga variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini, sehingga belum meneliti semua variabel yang dapat mempengaruhi implementasi standar akuntansi pemerintah berbasis akrual.
2. Peneliti hanya melakukan penelitian pada kota Pariaman, sehingga untuk Pemerintah Kabupaten/Kota lain yang berbeda dapat dimungkinkan terjadinya perbedaan kesimpulan.

C. Saran

Adapun saran yang mungkin berguna untuk penelitian selanjutnya adalah sebagai berikut.

1. Sebaiknya digunakan variabel lain yang mungkin berpengaruh terhadap implementasi sistem akuntansi pemerintah berbasis akrual seperti disposisi, komunikasi, sarana prasarana, komitmen organisasi dan faktor lainnya dalam melakukan penelitian mengenai implementasi standar akuntansi pemerintah berbasis akrual.
2. Untuk uji instrumen kepada responden yang tidak jauh dari responden sesungguhnya seperti staf akuntansi SKPD kabupaten/kota lain.
3. Bagi peneliti selanjutnya, agar mengambil sampel yang lebih banyak dan menambah variabel-variabel penelitian lain dalam penelitian ini. Misalnya variabel sistem pengendalian intern, asimetri informasi, ketaatan akuntansi, dan lain-lain.
4. Dalam penelitian ini masih terdapat kelemahan yaitu ada beberapa responden yang mengisi kuesioner penelitian yang tidak sesuai dengan kondisi yang sesungguhnya sehingga data yang diperoleh belum tentu menggambarkan keadaan yang sebenarnya, maka untuk penelitian selanjutnya sebaiknya selain menggunakan kuesioner dilakukan interview/bertanya langsung ke responden secara tegas dan jelas dan sebaiknya daerah penelitian di perluas ke SKPD kota lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

Kisi-kisi intrumen penelitian

No	Variabel	Indikator	Acuan
1.	Implementasi standar akuntansi pemerintah berbasis akrual	<ol style="list-style-type: none"> 1. Persiapan sumber daya manusia yang kompeten dan memadai dalam pengelolaan keuangan 2. Pelaksanaan secara intensif pelatihan dan sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 2010 3. Struktur organisasi dapat mengakomodasi proses penyusunan laporan keuangan 4. Penyusunan kebijakan dan standar akuntansi pemerintahan daerah yang berbasis akrual 5. Aplikasi pengelolaan keuangan daerah belum terintegrasi antara entitas akuntansi dan entitas pelaporan 6. Belum adanya alokasi anggaran secara khusus untuk kegiatan persiapan pelaksanaan akuntansi berbasis akrual 7. Belum adanya rencana pengembangan aplikasi/sistem pengelolaan keuangan sesuai dengan pengelolaan keuangan yang berbasis akrual. 	Biro Analisa Anggaran dan Pelaksanaan APBN (2014)
2.	Kompetensi sumber daya Manusia	<ol style="list-style-type: none"> 1. Sumber daya manusia yang andal 2. Kompetensi sumber daya manusia 3. Kemampuan memahami 4. Komunikasi yang baik 5. Memiliki pengetahuan, kemampuan, dan keterampilan 6. Perekrutan dan pelatihan 	Irma (2015) & I Dewa (2016)
3.	Resistensi terhadap perubahan	<ol style="list-style-type: none"> 1. <i>Habits</i> (kebiasaan) 2. <i>Security</i> (keamanan) 3. <i>Fear of the unknown</i> (ketakutan atas ketidaktahuan) 4. <i>Selective information processing</i> (proses informasi selektif) 5. <i>Structural inertia</i> (kelembaman struktur) 6. <i>Limited focus of change</i> (fokus terbatas pada perubahan). 	Herlina (2013)
4.	Sistem Informasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tepat waktu 2. Akurat 3. Ringkas 4. Relevan 5. Lengkap 	Marwansyah (2012)

KUESIONER

IDENTITAS RESPONDEN

- Nama Responden : _____
- Jenis Kelamin : laki-laki perempuan
- Umur : _____ tahun
- Jenjang Pendidikan : SLTA S1 S3
 D3 S2
- Masa Kerja : <5 Tahun 5-10 tahun
 >5 Tahun
- Jabatan : Kepala Sub bagian Keuangan (Pejabat Penatausahaan Keuangan).
 Bendahara.
 Pembantu PPK.
 Operator

Bapak/Ibu diminta untuk memberikan pendapat atas pernyataan dibawah ini, kemudian berilah tanda ceklist (√) satu dari lima alternatif jawaban yang terdapat dalam pernyataan tersebut.

- SS : Sangat Setuju**
S : Setuju
KS : Kurang Setuju
TS : Tidak Setuju
STS : Sangat Tidak Setuju
SS : Sudah Siap
BS : Belum Siap

1. Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan Basis AkruaI

No	Pernyataan	Pilihan Jawaban				
		BS				SS
1.	Pemerintah daerah mempersiapkan sumber daya manusia (SDM) yang kompeten dan memadai pada setiap SKPD dalam pengelolaan keuangan	<input type="checkbox"/>				
2.	Pelaksanaan secara intensif pelatihan dan sosialisasi Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis AkruaI	<input type="checkbox"/>				
3.	Struktur organisasi yang ada dapat mengakomodasi proses penyusunan laporan keuangan berbasis akruaI	<input type="checkbox"/>				
4.	Penyusunan kebijakan dan sistem akuntansi pemerintah daerah yang berbasis akruaI sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010	<input type="checkbox"/>				
5.	Aplikasi pengelolaan keuangan daerah terintegrasi antara entitas akuntansi dan entitas pelaporan	<input type="checkbox"/>				
6.	Belum adanya mengalokasikan anggaran secara khusus untuk kegiatan persiapan pelaksanaan akuntansi berbasis akruaI	<input type="checkbox"/>				
7.	Pemerintah daerah belum memiliki rencana pengembangan aplikasi/sistem pengelolaan keuangan sesuai dengan pengelolaan keuangan yang berbasis akruaI.	<input type="checkbox"/>				

2. Kompetensi Sumber Daya Manusia

No	Pernyataan	Pilihan Jawaban				
		SS	S	KS	TS	STS
8.	Kepala sub bagian keuangan/ akuntansi memiliki staf yang dapat diandalkan untuk setiap tugas yang diberikan	<input type="checkbox"/>				
9.	Staf akuntansi memiliki kemampuan untuk melaksanakan fungsi dan wewenangnya untuk mencapai tujuan organisasi	<input type="checkbox"/>				
10.	Staf akuntansi telah memahami bagaimana penerapan SAP berbasis akruaI	<input type="checkbox"/>				

11.	Staf akuntansi ialah orang yang memiliki profesionalitas dalam bidangnya	<input type="checkbox"/>				
12.	Pemerintah mengadakan perencanaan SDM khusus di bidang akuntansi pemerintahan	<input type="checkbox"/>				
13.	Adanya sistem insentif untuk mencegah timbulnya praktik korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) terkait akuntansi	<input type="checkbox"/>				
14.	Staf akuntansi telah direkrut sesuai dengan kompetensinya	<input type="checkbox"/>				
15.	Staf akuntansi telah diberikan pelatihan yang cukup terkait akuntansi	<input type="checkbox"/>				
16.	Pelatihan selalu dilakukan untuk meningkatkan keterampilan dan pengetahuan setiap staf akuntansi	<input type="checkbox"/>				
17.	Pelatihan secara berkelanjutan dilakukan sehingga staf mempunyai pemahaman yang jelas tentang pp 71 Tahun 2010	<input type="checkbox"/>				
18.	Penerapan kebijakan dikomunikasi dalam bentuk sosialisasi PP 71 Tahun 2010	<input type="checkbox"/>				
19.	Penerapan kebijakan dikomunikasi dalam bentuk bimbingan teknis penyusunan LKKL berbasis akrual	<input type="checkbox"/>				

3. Resistensi Terhadap Perubahan

No	Pernyataan	Pilihan Jawaban				
		SS	S	KS	TS	STS
20.	Perubahan memberikan tantangan untuk pengembangan keterampilan baru sehingga harus mengubah kebiasaan	<input type="checkbox"/>				
21.	Perubahan menimbulkan ketidakpastian sehingga berdampak negatif terhadap kelangsungan masa depan	<input type="checkbox"/>				
22.	Perubahan ke kebijakan yang baru mengakibatkan rasa takut karena belum memiliki pengetahuan tentang kebijakan itu	<input type="checkbox"/>				
23.	Cenderung mendengar apa yang ingin di dengar dengan mengabaikan informasi yang berbeda dengan	<input type="checkbox"/>				

	apa yang telah di bangun	
24.	Penolakan terhadap perubahan apabila perkembangan teknologi tidak sejalan dengan perubahan struktur organisasi	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
25.	Tindakan pekerja sesuai dengan kekuatan organisasional	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
26.	Perubahan mengakibatkan kelembaman pada struktur organisasi	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>

4. Sistem Informasi

No	Pernyataan	Pilihan Jawaban				
		SS	S	KS	TS	STS
27.	Sistem informasi menyediakan informasi sebagai penunjang proses perencanaan, pengendalian serta fungsi dari manajemen pemerintahan	<input type="checkbox"/>				
28.	Informasi yang didapatkan sebagai pengambilan keputusan bagi manajemen pemerintahan, pihak eksternal serta pihak-pihak yang membutuhkan	<input type="checkbox"/>				
29.	Tersedianya teknologi informasi berupa <i>hardware</i> (perangkat keras) yang memadai untuk pelaksanaan SAP basis akrual	<input type="checkbox"/>				
30.	Tersedianya <i>software</i> (perangkat lunak) yang memadai untuk pelaksanaan SAP basis akrual	<input type="checkbox"/>				
31.	Integritas peralatan, program, data dan prosedur untuk satu tugas dalam satu komputer	<input type="checkbox"/>				
32.	Informasi yang dihasilkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang ditetapkan	<input type="checkbox"/>				
33.	Terdapat informasi sesuai dengan hasil dari SAP berbasis akrual	<input type="checkbox"/>				
34.	Penyajian semua informasi yang relevan	<input type="checkbox"/>				

35.	Informasi yang dihasilkan dapat diandalkan untuk mencapai tujuan organisasi yang efektif dan efisien	<input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>
-----	--	--

-TERIMA KASIH-

Padang, Januari 2017

Kepada Yth,

Bapak/Ibuk Responden

Di tempat

Dengan hormat,

Sebelumnya semoga Bapak/Ibuk dalam keadaan sehat dan selalu sukses, aamin. Saya adalah Mahasiswa program studi Akuntansi di Universitas Negeri Padang, adapun identitas Saya adalah sebagai berikut:

Nama : Ade Fitri
NIM : 1202554
BP : 2012

Saat ini Saya sedang melakukan penelitian guna untuk menyelesaikan tugas akhir skripsi. Namun kelancaran penelitian ini sangat tergantung dari kesediaan Bapak/Ibuk memberikan informasi yang Saya kumpulkan melalui kuesioner (terlampir), untuk Skripsi yang berjudul “ **Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Resistensi Terhadap Perubahan, dan Sistem Informasi terhadap Implementasi Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua.**”

Informasi yang diperoleh dari Bapak/Ibuk akan Saya jaga kerahasiaannya, dan hanya akan digunakan untuk keperluan penelitian semata. Untuk itu Saya mohon kesediaan Bapak/Ibuk untuk dapat kiranya membantu dalam memberikan jawaban pada kuesioner yang terlampir. Bapak/Ibuk dimohonkan untuk memberikan tanda *check list* (√) pada kolom pilihan yang telah disediakan sesuai dengan pendapat Bapak/Ibuk mengenai pernyataan atau pertanyaan yang diberikan.

Demikian surat ini Saya sampaikan, atas perhatian dan kesediaan Bapak/Ibuk Saya ucapkan terimakasih.

Hormat Saya,

Ade Fitri